

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 6-8 Juni 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, halaman 4	Sabtu, 6 Juni 2020	BP Tapera Siap Penuhi Dua Janji	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan bahwa dua janji bagi peserta, yakni imbal hasil simpanan dan manfaat perumahan, dapat dipenuhi dengan strategi alokasi dana untuk investasi.
2	Koran Tempo, halaman Ekonomi Bisnis 1	Sabtu, 6 Juni 2020	Pemerintah Alihkan Dana Pembiayaan Perumahan ke Program Tapera	Kementerian PUPR akan melimpahkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) secara bertahap kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
3	Tribunnews.com	Minggu, 7 Juni 2020	Begini Kabar Terbaru Pengendalian Lumpur Sidoarjo dari Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo. https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/06/07/begini-kabar-terbaru-pengendalian-lumpur-sidoarjo-dari-kementerian-pupr
4	Antaranews.com	Minggu, 7 Juni 2020	Kementerian PUPR tuntaskan konstruksi perpustakaan Politeknik Jakarta	Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan fasilitas pendidikan berupa Gedung Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta. https://www.antaranews.com/berita/1539764/kementerian-pupr-tuntaskan-konstruksi-perpustakaan-politeknik-jakarta
5	Tempo.co	Senin, 8 Juni 2020	Anggaran Rp 239 Miliar untuk Jaga Aliran Lumpur Lapindo Tahun Ini	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalokasikan Rp 239,7 miliar untuk pekerjaan penanganan dampak semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tahun ini. Kementerian PUPR berjanji tak mengurangi perhatiannya terhadap bencana yang telah terjadi sejak 29 Mei 2006 tersebut. https://tekno.tempo.co/read/1350816/anggaran-rp-239-miliar-untuk-jaga-aliran-lumpur-lapindo-tahun-ini
6	Tempo.co	Minggu, 7 Juni 2020	Pelatihan Online Teknologi Konstruksi, Ini Pesan Menteri PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pelatihan jarak jauh di bidang jasa konstruksi khususnya penerapan Building Information Modeling. https://bisnis.tempo.co/read/1350800/pelatihan-online-teknologi-konstruksi-ini-pesan-menteri-pupr
7	Beritasatu.com	Minggu, 7 Juni 2020	Kempupera Gelar Pelatihan Jarak Jauh Penerapan BIM	Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi. https://www.beritasatu.com/ekonomi/642277-kempupera-gelar-pelatihan-jarak-jauh-penerapan-bim
8	Bisnis.com	Minggu, 7 Juni 2020	Penanganan Lumpur Sidoarjo Sedot Hampir Rp240 Miliar Tahun Ini	Kementerian PUPR melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp239,7 miliar. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200607/45/1249478/p-enanganan-lumpur-sidoarjo-sedot-hampir-rp240-miliar-tahun-ini
9	Sindonews.com	Sabtu, 6 Juni 2020	Pembangunan Tugu Nol Kilometer Tunggu Izin Kementerian PUPR	Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan membangun tugu nol kilometer. Lokasinya berada di ujung Jalan Tol Reformasi depan pintu utara Pelabuhan Soekarta Hatta. Proyek pembangunan tugu ini merupakan bantuan kerjasama atau CSR dari PT Pelindo IV dengan menelan

				anggaran kurang lebih Rp200 juta. https://makassar.sindonews.com/newsread/60933/711/pe-mbangunan-tugu-nol-kilometer-tunggu-izin-kementerian-pupr-1591445208
10	Akurat.co	Sabtu, 6 Juni 2020	Kementerian PUPR Dukung Kemantapan Infrastruktur Jalan untuk Jaga Kelancaran Logistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendukung penanganan pandemi COVID-19, salah satunya dengan meningkatkan kelancaran distribusi Logistik. https://akurat.co/id-1133765-read-kementerian-pupr-dukung-kemantapan-infrastruktur-jalan-untuk-jaga-kelancaran-logistik
11	Antaranews.com	Sabtu, 6 Juni 2020	Kementerian PUPR sebut keluarnya PP Tapera adalah berkah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menilai terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2020 penting bagi operasional Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). https://m.antaranews.com/amp/berita/1537696/kementerian-pupr-sebut-keluarnya-pp-tapera-adalah-berkah
12	Suara.com	Minggu, 7 Juni 2020	Kementerian PUPR Targetkan Badan Pengelola Tapera Bakal Beroperasi 2021	Pemerintah akan memotong gaji pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN serta swasta sebesar 3 persen untuk iuran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). https://www.suara.com/bisnis/2020/06/07/170421/kementerian-pupr-targetkan-badan-pengelola-tapera-bakal-beroperasi-2021
13	Beritamometer.com	Minggu, 7 Juni 2020	Tingkatkan Distribusi, PUPR Dukung Kelancaran Jalur Logistik Di Tengah Pandemi	Kementerian PUPR terus berupaya mendukung penanganan Pandemi COVID-19, salah satunya dengan meningkatkan kelancaran distribusi logistik. Guna mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar webinar Dukung Kelancaran Jalur Logistik Di Tengah Pandemi yang diikuti 262 peserta pada Kamis (4/6/2020). https://www.beritamometer.com/tingkatkan-distribusi-pupr-dukung-kelancaran-jalur-logistik-di-tengah-pandemi/ s

Judul	BP Tapera Siap Penuhi Dua Janji	Tanggal	Sabtu, 6 Juni 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 4		
Resume	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan bahwa dua janji bagi peserta, yakni imbal hasil simpanan dan manfaat perumahan, dapat dipenuhi dengan strategi alokasi dana untuk investasi.		

| TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT |

BP Tapera Siap Penuhi Dua Janji

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan bahwa dua janji bagi peserta, yakni imbal hasil simpanan dan manfaat perumahan, dapat dipenuhi dengan strategi alokasi dana untuk investasi.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro menjelaskan bahwa kedua hal tersebut menjadi janji yang harus dipenuhi kepada peserta.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 25/2020 tentang Tapera, seluruh pekerja dengan penghasilan di atas upah minimum diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera.

Meskipun begitu, dengan kewajiban tersebut, hanya peserta berpenghasilan rendah yang mendapatkan pembiayaan perumahan.

Peserta dengan penghasilan di atas Rp8 juta diwajibkan membayar sim-

panan secara rutin. Pada masa akhir kepesertaan, yakni saat memasuki masa pensiun, peserta tersebut berhak untuk mengambil simpanannya disertai imbal hasil pemupukan dana oleh BP Tapera.

Eko menjelaskan bahwa badan yang akan segera beroperasi itu akan mampu memenuhi kedua janjinya kepada peserta dengan mengelola dana menggunakan prinsip alokasi. Dana simpanan peserta akan dikelola dalam bentuk kontrak investasi kolektif (KIK).

"Tidak seluruh dana yang dialihkan dari Tabungan Perumahan [Taperum] PNS sebagai modal awal BP Tapera disalurkan menjadi pembiayaan perumahan. Kami gunakan mekanisme alokasi, sekian persen untuk perumahan, pemupukan, dan dana cadangan," ujar Eko pada Jumat (5/6).

Deputi Komisioner BP Tapera Adi Setianto men-

jelaskan bahwa Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tapera mengatur mekanisme alokasi tersebut. BP Tapera harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pemupukan, serta sebagian lainnya untuk pengelolaan dan cadangan.

Alokasi tersebut menurutnya ditetapkan berdasarkan perhitungan BP Tapera terkait kebutuhan dana jangka panjang dan kebutuhan likuiditas. Dia menegaskan bahwa strategi tersebut dapat menjaga program Tapera tetap berjalan dan manfaat bagi peserta dapat terjaga.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menilai bahwa terbitnya peraturan mengenai Tapera harus disyukuri, meskipun aturan terbit di tengah pandemi virus corona.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan keberadaan PP itu pun membuat transmisi dana dari Tabungan Perumahan (Taperum) milik para pegawai negeri sipil (PNS) dapat dilaksanakan. Dana dari Taperum itu akan digunakan sebagai modal awal Tapera dalam beroperasi.

"Ada beberapa hal yang tidak bisa dipersiapkan tanpa adanya PP [25/2020], transmisi Taperum misalnya. BP Tapera mempunyai waktu 6—7 bulan mempersiapkan itu semua karena akan dimulai pada 2021," ujar Eko.

Eko menyatakan bahwa para PNS tidak perlu merasa khawatir dengan pengalihan dana Taperum ke Tapera karena haknya akan tetap terpenuhi. Selain itu, pada 2021 pun BP Tapera akan terlebih dahulu fokus menggarap segmen peserta PNS. (Wib/Pangestu Pratama)

Judul	Pemerintah Alihkan Dana Pembiayaan Perumahan ke Program Tapera	Tanggal	Sabtu, 6 Juni 2020
Media	Koran Tempo, halaman Ekonomi Bisnis 1		
Resume	Kementerian PUPR akan melimpahkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) secara bertahap kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).		

EKONOMI DAN BISNIS

Pemerintah Alihkan Dana Pembiayaan Perumahan ke Program Tapera

Badan pengelola tabungan menargetkan 13 peserta pada 2024.

EDISI, 6 JUNI 2020



JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan melimpahkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) secara bertahap kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan saat ini dana *outstanding* atau total dana fasilitas pembiayaan mencapai Rp 40 triliun.

Dana tersebut merupakan uang pemerintah yang pernah ditanam di Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP). “Pengembalian pokok diangsur secara bulanan dan diterima kembali oleh pemerintah. Itu yang kemudian dialihkan ke tapera sebagai porsi pemerintah,” kata Heripoerwanto, kemarin. “Konsep dan landasan hukum pengalihannya akan disiapkan segera.”

Dia memastikan program kredit pemilikan rumah bersubsidi tidak akan dihentikan selama masa transisi BP Tapera menuju operasional. Selain FLPP, program subsidi perumahan rakyat lainnya, seperti subsidi selisih bunga serta subsidi bantuan uang muka dan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, akan dialihkan ke program tapera.

“Pelimpahan akan berlangsung bertahap. Tapi kami memastikan yang sudah dijalankan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tak akan terhenti pada saat transisi BP Tapera operasional,” kata Heripoerwanto.

Program tapera mewajibkan iuran simpanan untuk pekerja formal dengan besaran 3 persen dari upah atau penghasilan. Iuran tersebut ditanggung pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen oleh pekerja. Peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah berhak mengajukan pembiayaan setelah memenuhi kriteria satu tahun kepesertaan.

Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro, menargetkan 13 juta peserta pada 2024. Untuk tahap awal, peserta tapera merupakan eks-Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) hingga 2021. “Sekitar 4,2 juta peserta eks Bapertarum-PNS nantinya akan menjadi peserta awal program tapera. Kami juga telah memetakan berapa sebenarnya potensi peserta BP Tapera untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Kemudian, BP Tapera juga menerima pengalihan program FLPP hingga 2022. Setelah itu, peserta akan diperluas pada kelompok pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan TNI/Polri hingga 2023.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengatakan para pekerja yang telah memiliki rumah juga dapat melakukan pinjaman untuk renovasi. Sedangkan pekerja yang sudah memiliki tanah dapat melakukan pinjaman untuk membangun rumah. Dana pinjaman akan disalurkan melalui perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Halim Haryono mengatakan salah satu skema yang dipakai oleh BP Tapera adalah melalui kontrak investasi kolektif. Artinya, kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian untuk mengelola dana tapera. “Nantinya bank kustodian setiap hari akan menilai aset dari peserta, dan pastinya BP Tapera sudah memilih manajer investasi yang berintegritas,” kata dia.

Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menuturkan program tabungan perumahan akan menambah kuota rumah menengah bawah sekaligus mendorong program sejuta rumah pemerintah. Dengan begitu, pemerintah juga bisa menurunkan *backlog* perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski begitu, Daniel berujar program tersebut didukung oleh kebijakan yang mampu melindungi dan mendukung masyarakat agar bisa memperoleh kepemilikan rumah. Menurut dia, perlu ada percepatan berbagai aturan yang menghambat, dari pemisahan sertifikat, jaringan atau daya listrik, perpajakan peninjauan lokasi, hingga proses persetujuan akad kredit bank pelaksana. “Hal itu diperlukan agar konsumen masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah bisa cepat merealisasi akad kredit pemilikan rumahnya,” ujarnya.

LARISSA HUDA

Genjot Penyediaan Rumah

Pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menggenjot penyediaan rumah bagi masyarakat. Jumlah peserta tabungan pada 2024 mencapai 13 juta orang.

Peta Jalan Perumahan Rakyat

2020-2021. Meningkatkan kredibilitas, Pengalihan program Tapera PNS ke BP Tapera. Operasional Tapera dengan fokus pada layanan ASN. Pengalihan program FLPP ke BP Tapera.

2022-2023. Perluasan kepesertaan pada segmen BUMN/BUMD/BUMDes dan TNI/Polri. Pengembangan layanan Tapera melalui aplikasi digital platform.

2024. BP Tapera menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia.

Jumlah Rumah Terbangun dan Kebutuhan Rumah (Backlog)

Negara	Jumlah Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga	Persentase
Cina	425 juta	472 juta	10 %
India	252 juta	291 juta	13,3 %
Indonesia	56 juta	68 juta	16,8 %

Backlog Rumah Aparat Sipil Negara (ASN)

Golongan	Jumlah ASN	Domes Memilik Rumah (Unit)	Backlog ASN (%)
I	53,6 ribu	17,8 ribu	33,2 %
II	885,0 ribu	288 ribu	32,6 %
III	2.365 ribu	750 ribu	31,6 %
IV	919 ribu	21,4 ribu	2,3 %
Total	4,2 juta	1,1 juta	25,8 %

(DATA BKN PER 2019)

SUMBER: BP TAPERA

Pemerintah Alihkan Dana Pembiayaan Perumahan ke Program Tapera